

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andrisman, T. (2010). Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. 98
Bandar Lampung.
- Arief , B. N. (2011). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Danil, E. (2002). Diktat Hukum Penitensier . Padang: Universitas Andalas.
- Fraser, D. (2003). Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail. Jurnal Hukum Bisnis, 22 No 3.
- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2011). "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju pada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Jakarta: Kencana.
- Husein, Y. (2003). Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Bisnis, 22 Nomor 3, 26.
- Husein, Y. (2014). Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering). Jakarta: Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Mayang: Bayumedia Publishing.
- Kanter, E., & Sianturi , S. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Storia Grafika.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
- Latif, A., & Ali, H. (2011). Politik Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1991). Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum (deik). Jakarta: Sinar Grafika.
- Martojo, M. (2000). Politik Hukum Dalam Sketsa. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 Kuhp (Vol. VI). Lex Crimen.
- Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyosudarmo, S. (1997). Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara. Jakarta: Gramedia.
- Priyatno, D. M. (1991). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana . Bandung: Sekolah Tinggi Bandung.
- Saleh, R. (1982). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono (2005). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS
- Sutrisna, I. B. (1986). Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP). (A. (. Hamzah, Penyunt.) Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrech, E. (1958). Hukum Pidana I. Djakarta: Universitas Indonesia.
- Saleh Roeslan, (1980). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Hal. 75
- Huda Chairul, (2006) Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Ali Mahrus, (2015) Dasar - dasar Hukum Pidana, Jakarta; Sinar Grafika
- Sitompul Zulkarnain (2015) Problematika Perbankan, Bandung; Books Terrace & library
- Saprudin Yusuf, (2016), Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Jakarta; Rineka Cipta
- Saprudin Yusuf, (2006) Money laundering, Jakarta: Grafika indah
- Bammelen van J.M, (1984), Hukum Pidana I (OLLS Strafrecht I) Bandung; Binacipta
- Nawawi Barda Arief, (1990) Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta; CV. Rajawali
- Moeljatno, (2002) Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta
- Nawawi Barda Arief, Bunga Rampai Kebijakan hlm 25

- Wisnubroto. (2004) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta; Universitas Atmajaya
- Mahmud Mulyadi, (2008) Criminal Policy; Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Pneal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan; Pustaka Bangsa Press,
- Hoefnagels G. Peter. (1973) The other side of criminology (Holland; Kluwer Deventer
- A.S Alam, (2010), Pengantar Kriminologi, Makassar; Pustaka Refleksi Books
- Krisnawati Deni (2016), Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta; Pena Pundi Aksara.
- Wiyono, (2014), Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Grafika
- Johan N. B (2002) Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta
- Dinitto, M Diana, (2000) Sosial Welfare, Politics and Public Policy, Allyn & Bacon, Boston, hal. 2. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, 2013, hlm. 4

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

- Husein, Y. (2003). PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 26.
- Fraser, D. (2003). Lawyers, Guns and Money, Economics and Ideology on The Money Trail. Jurnal Hukum Bisnis, 22 No 3.
- Marlina Andi, Rizki Imron, Salam Safri (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa Umrah Abu Tour. Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Perundang-undangan

- Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 Tentang hak terdakwa melakukan pembuktian dalam harta benda yang dimilikinya.

WEBSITE/INTERNET

Arief , B. N. (2022, September 16). Pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana. Retrieved from <https://mh.uma.ac.id/>

Husein, Y. (2007, Juli 11). Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering). Retrieved Januari 08, 2023, from https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf;

Laucereno, S. F. (n.d.). Dalam 2 Tahun Ada 10 T Duit Terindikasi Pencucian Uang. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasipencucian-uang>.

Yehezkiel Kristian. (2012 Februari). Kebijakan Hukum Pidana. <http://yehezkielkristian.blogspot.com/2012/02/kebijakan-formulasi-hukum-pidana.html>

PPATK, Tipologi Pencucian Uang (2017)
<https://www.ppatk.go.id>